

## ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SEI SEMAYANG

Miftah Faridh Nasir<sup>1</sup>, Emilia Embun Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Politeknik Unggul LP3M

<sup>2</sup>Akuntansi Perpajakan Politeknik Unggul LP3M

### ABSTRAK

*Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan keuangan desa di Desa Sei Semayang dan Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Semayang sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di desa Sei Semayang dan Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Sei Semayang dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut pemedagri Nomor. 113 Tahun 2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.*

**Kata Kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

### Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa melalu SPP dan di verifikasi oleh Sekdes. Untuk dapat mengevaluasi kegiatan di masing-masing bidang maka di butuhkan pelaporan agar berjalan dengan baik. Sehingga Desa yang saya observasi kini mendapat predikat Terbaik Nomor 2 di Kabupaten Deli Serdang bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa selanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (*hasil wawancara bendahara desa, 2 Juli 2020*).

Pemerintah desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang membentuk tim khusus sendiri yang betugas yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengawasi kegiatan pembangunan, Pengelola yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitoring di saat ada kegiatan pembangunan yang terealisasi.

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati pada Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun Berjalan. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Sunggal, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Tahun Berjalan. Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kecamatan atau kabupaten.

### Pembahasan

#### Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal adalah buku kas umum yang secara offline dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu Pertanggungjawaban. Untuk tahun anggaran 2018 bendahara desa Sei Semayang sudah melakukan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa yaitu Penatausahaan

(hasil wawancara bendahara desa, 2 Juli 2020). Berikut buku kas umum yang dibuat bendahara desa Sei Semayang yaitu:

### Buku Kas Umum-Tunai

Gambar . 4.1. Tabel buku kas umum-tunai desa sei semayang

BUKU KAS UMUM - TUNAI DESA SEI SEMAYANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018								
No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/02/2018		Penarikan Tunai Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Jan 2018. Kas di Bendahara	38.700.000,00	0,00	0001/SLIP/13.01/2018	0,00	38.700.000,00
2	05/02/2018		Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Januari 2018. Kas di Bendahara	0,00	38.700.000,00	0001/SPP/13.01/2018	38.700.000,00	0,00
3	27/02/2018		Penarikan Tunai Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Feb 2018. Kas di Bendahara	38.700.000,00	0,00	0002/SLIP/13.01/2018	38.700.000,00	38.700.000,00
4	28/02/2018		Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Februari 2018. Kas di Bendahara	0,00	38.700.000,00	0002/SPP/13.01/2018	77.400.000,00	0,00
5	29/03/2018		Penarikan Tunai Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Mar 2018. Kas di Bendahara	38.700.000,00	0,00	0003/SLIP/13.01/2018	77.400.000,00	38.700.000,00
6	29/03/2018		Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Maret 2018. Kas di Bendahara	0,00	38.700.000,00	0003/SPP/13.01/2018	116.100.000,00	0,00
7	30/04/2018		Penarikan Tunai Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan April 2018. Kas di Bendahara	38.700.000,00	0,00	0004/SLIP/13.01/2018	116.100.000,00	38.700.000,00
8	30/04/2018		Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan April 2018. Kas di Bendahara	0,00	38.700.000,00	0004/SPP/13.01/2018	154.800.000,00	0,00
9	03/05/2018	7.1.1.03.	Pembayaran Bahan Paving Blok sebanyak 4.400 Pcs dan Cabstone 500 Pcs. Potongan Pajak RPH Pasal 22	227.318,00	0,00	00015/KWT/13.01/2018	154.800.000,00	227.318,00

Printed by Sisketudoc 28/06/2020 10:10:59

Halaman 1

Sumber: Desa Sei Semayang

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

### Buku Kas Pembantu Pajak

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
DESA SEI SEMAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	09/05/2018	00015/KWT/13.01/2018			
		Pembayaran Bahan Paving Blok sebanyak 4.400 Pcs dan Cabstone 500 Pcs.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	227.318,00	0,00	227.318,00
2	03/05/2018	00016/KWT/13.01/2018			
		Pembayaran Bahan Material untuk Pemasangan Paving Blok di Dusun XVI Pasar VI Blok D.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.515.454,00	0,00	1.742.772,00
3	03/05/2018	00019/KWT/13.01/2018			
		Pembayaran Bahan Material untuk Pemasangan Paving Blok di Dusun XVI Pasar VI Blok D.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	174.727,00	0,00	1.917.499,00
4	15/05/2018	00022/KWT/13.01/2018			
		Pembayaran Bahan Material untuk Pemasangan Paving Blok di Dusun XVI Pasar VI Blok D.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	26.209,00	0,00	1.943.708,00
5	03/05/2018	00019/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Belanja Modal bahan material untuk Pembangunan Rabat Beton di Dusun I Aman Damal			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	293.957,00	0,00	2.237.665,00
6	15/05/2018	00022/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Belanja Modal bahan material untuk Pembangunan Rabat Beton di Dusun I Aman Damal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.959.713,00	0,00	4.197.378,00
7	15/05/2018	00022/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor Pemerintahan Desa.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	833.139,00	0,00	5.030.517,00
8	15/05/2018	00026/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor Pemerintahan Desa.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	124.971,00	0,00	5.155.488,00
9	15/05/2018	00026/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Alat Tulis Kantor BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	22.273,00	0,00	5.177.761,00
10	15/05/2018	00027/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Alat Tulis Kantor BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.341,00	0,00	5.181.102,00
11	15/05/2018	00027/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Cetak dan Penggandaan Materi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	34.091,00	0,00	5.215.193,00
12	15/05/2018	00028/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Cetak dan Penggandaan Materi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.114,00	0,00	5.220.307,00
13	15/05/2018	00028/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Blaya Makan dan Minum			
		Potongan Pajak PPN Pusat	172.909,00	0,00	5.393.216,00
14	15/05/2018	00032/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Blaya Makan dan Minum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.936,00	0,00	5.419.152,00
15	15/05/2018	00032/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Belanja Modal bahan Material.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	8.210.000,00	0,00	13.629.152,00
16	15/05/2018	00035/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Belanja Modal bahan Material.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.231.500,00	0,00	14.860.652,00
17	15/05/2018	00035/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Pengadaan Alat Tanaman dan Tanaman Bunga.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	884.182,00	0,00	15.744.834,00
18	15/05/2018	00038/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan Pengadaan Alat Tanaman dan Tanaman Bunga.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	132.627,00	0,00	15.877.461,00
19	15/05/2018	00038/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan bahan Paving Blok dan Cabstone			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.663,00	0,00	15.938.124,00
20	15/05/2018	00038/KWT/13.01/2018			
		Dibayarkan bahan Paving Blok dan Cabstone			
		Potongan Pajak PPN Pusat	404.418,00	0,00	16.342.542,00

Gambar. 4.2. Tabel buku kas pembantu pajak desa sei semayang  
Sumber: Desa Sei Semayang

## Buku Bank Desa

Gambar. 4.3. Tabel buku bank desa sei semayang

**BUKU BANK DESA  
DESA SEI SEMAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

BULAN : Januari 2018  
NAMA BANK : BANK SUMUT  
NO. REK. : 315.02.04.004665-8

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/01/2018	Saldo Awal	0018/TBP/13.01/2018	113.470.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.470.485,00
2	15/01/2018	Potongan Admin Bank Bulan Januari	0001/ADMN/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	113.465.485,00
3	29/01/2018	Diterima Siltap Kades, Perangkat, Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Jan 2018	0001/TBP/13.01/2018	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165.485,00
4	31/01/2018	Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari	0001/BNGA/13.01/2018	0,00	199.398,00	0,00	0,00	0,00	152.364.883,00
5	31/01/2018	Potongan Pajak Bank Bulan Januari	0002/PJAK/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	39.879,00	0,00	152.325.004,00
6	05/02/2018	Penarikan Tunal Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Jan 2018.	0001/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00	113.625.004,00
7	15/02/2018	Potongan Admin Bank Bulan Februari	0003/ADMN/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	5.000,44	0,00	113.620.003,56
8	27/02/2018	Diterima Siltap Kades, Perangkat, Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Feb 2018	0002/TBP/13.01/2018	-38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.320.003,56
9	27/02/2018	Penarikan Tunal Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Feb 2018.	0002/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00	113.620.003,56
10	28/02/2018	Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari	0002/BNGA/13.01/2018	0,00	218.290,00	0,00	0,00	0,00	113.838.293,56
11	28/02/2018	Potongan Pajak Bank Bulan Februari	0004/PJAK/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	43.658,00	0,00	113.794.635,56
12	15/03/2018	Potongan Admin Bank Bulan Maret	0005/ADMN/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	113.789.635,56
13	29/03/2018	Diterima Siltap Kades, Perangkat, Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Maret 2018	0003/TBP/13.01/2018	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.489.635,56
14	29/03/2018	Penarikan Tunal Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunj Kades, Perangkat Desa dan Tunj BPD Bulan Mar 2018.	0003/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00	113.789.635,56
15	31/03/2018	Pendapatan Bunga Bank Bulan Maret	0003/BNGA/13.01/2018	0,00	265.763,00	0,00	0,00	0,00	114.055.398,56
16	31/03/2018	Potongan Pajak Bank Bulan Maret	0006/PJAK/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	53.153,00	0,00	114.002.245,56
17	15/04/2018	Potongan Admin Bank Bulan April	0007/ADMN/13.01/2018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	113.997.245,56

Printed by Siskeudes 28/06/2020 10.13.07 Halaman 1

Sumber: Desa Sei Semayang

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal yang dilakukan sudah maksimal yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara Desa Sei Semayang Sudah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank. Jika bendahara desa sudah membuat buku kas umum, maka meminimalisir salah pencatatan pada keuangan desa dan tidak terjadinya penyelewengan Dana Desa di karenakan Desa Sei Semayang Sudah memakai Aplikasi berbasis SISKUDES ( Sistem Keuangan Desa ) dari BPKP.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat sural pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Pelaporan keuangan Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal tidak mengalami keterlambatan karena Desa Sei Semayang memiliki aplikasi yang di berikan oleh Bupati yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Maka dapat disimpulkan bawasannya

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terkait dengan pengelolaan keuangan pada Desa Sei Semayang di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang :

- 1) Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap pemerintah Desa Sei Semayang yang ada di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terkhusus bagi para staf desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan-laporan lainnya, agar dapat Desa Sei Semayang maju berkembang pesat dengan berdaya saing dengan desa-desa lainnya. Dan dapat saling bekerja sama dengan bendahara agar para staf lainnya dapat mendukung atas penyusunan laporan keuangan desa.
- 2) Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
- 3) Dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang lebih baik lagi dan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; ANDL
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. J13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian S/s/i/.v*. Jakarta Sclatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabcta.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015b). *Akuntansi Sektor Puhlik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015c). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch: The World Bank.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.